

Konsep Perilaku Teritorialitas di Kawasan Pasar Sudirman Pontianak

¹FERY KURNIADI¹, DIANANTA PRAMITASARI², DJOKO WIJONO²

¹Program Studi Teknik Arsitektur Konsentrasi Desain Kawasan Binaan, Jurusan Teknik Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada, Jl. Grafika no. 2, Sekip, Yogyakarta 55281.

²Jurusan Teknik Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada.

Alamat koresponden: Hp. +6281345536876, E-mail: recofery@yahoo.com

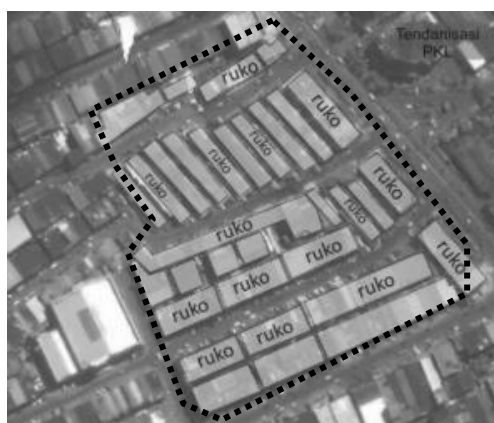
Abstract: *As the capital city of the Province of West Kalimantan, Pontianak has become a 'magnet' for economic actors, included the Street-Vendor. The Government has not fully able to provide a place for vendors to move as one of the potential of community-based economic. One of the Local Government effort is 'Awning Program' in Sudirman market to provide location for informal sector. However, that case causes the next problems which are: the used space conflict among the users, where in Environment and Behavior Architecture it is called as Territoriality Problem. The method that was used to learn the territoriality conception was on quantitative with descriptive statistic and on qualitative with user group's territoriality mapping. Data were gathered by interviews, questioners, person centered mapping, place centered mapping, and physical tracing. By the analysis result it were found six user group's territoriality: Primary Territory User Group Street-Vendor; Primary Territory User Group Shop-Owner; Primary Territory User Group Parking-Man; Primary Territory User Group Pedestrian And Driver; And Secondary Territoriality. Afterwards, those six were grouped on three user groups territoriality: "Invator"; "Aggresor"; and "Penderita".*

Keywords : *territoriality, territory, street-vendor, informal sector.*

Pontianak sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Barat merupakan pusat kegiatan pemerintahan, pendidikan dan perdagangan tidak luput dari fenomena Pedagang Kaki Lima (PKL). Pemerintah Kota Pontianak telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan guna menanggulangi permasalahan PKL, seperti adanya kebijakan untuk tendanisasi di kawasan Pasar Sudirman pada tahun 2002. Setelah rencana tendanisasi tersebut berjalan, masih terjadi kontroversi dan penolakan dari Pemilik Toko serta permasalahan konflik penggunaan ruang antara pengguna ruang. Konflik penggunaan ruang antara Pemilik Toko, PKL dan Pengguna ruang publik tersebut yang mana di dalam Arsitektur Lingkungan dan Perilaku menunjukkan adanya konflik teritorialitas dalam penggunaan ruang. Berdasar kepada latar belakang dan permasalahan yang dihadapi, maka pertanyaan penelitian dirumuskan untuk mengetahui bagaimana konsep perilaku teritorialitas setempat. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui konsep perilaku teritorialitas tersebut.

Beberapa penelitian mengenai perilaku teritorialitas di ruang publik telah pernah dilakukan. Angkasa (1998) meneliti teritorialitas di kawasan permukiman rakit di muara Sungai Ogan Palembang. Lokasi penelitian dilakukan di wilayah sungai (air). Penelitian yang dilakukan

Hidayah (1998) bertujuan untuk mengidentifikasi batas suatu sub kultur dengan studi kasus Pesantren Pabelan di Magelang. Sementara penelitian Rusmana (2007), bertujuan melihat teritorialitas pada jalur pejalan kaki di Jalan Urip Sumoharjo Yogyakarta berdasar kualitas hubungan perilaku pengguna teritori dengan *setting*. Dari penelitian-penelitian di atas menunjukkan permasalahan teritorialitas di ruang publik menjadi suatu kasus yang menarik untuk dikaji. Di lain sisi, konflik penggunaan ruang antar pengguna di kawasan Pasar Sudirman memiliki urgensi untuk diselesaikan. Selain itu, penelitian-penelitian sejenis yang mengangkat permasalahan perilaku teritorialitas yang mengambil lokasi di kota Pontianak masih cukup jarang. Hal tersebut mendorong penelitian mengenai teritorialitas di Pasar Sudirman ini untuk dilaksanakan.



Gambar 1. Wilayah penelitian
Sumber : Data olahan, 2008

METODE

Observasi awal dilakukan dengan mengambil foto-foto dan melakukan pemetaan lokasi untuk mengetahui fungsi-fungsi dari masing-masing los toko di wilayah penelitian. Langkah berikutnya adalah melakukan wawancara dan pengisian kuesioner kepada responden. Pengambilan sampel untuk Pemilik toko dan PKL dilakukan dengan teknik *grouping* acak dua tahap. Sedangkan untuk Tukang Parkir dan Pejalan Kaki, sampel diambil dengan teknik sampel acak sederhana. Jumlah sampel Pemilik toko adalah 13 unit (populasi 127 unit); PKL 14 unit (populasi 137 unit); tukang parkir 4 unit (populasi 14 unit); pejalan kaki 12 orang; dan pengendara kendaraan 63 orang. Selanjutnya dilakukan observasi lanjutan dengan memetakan dan mengambil foto toko-toko dan kios-kios PKL di malam hari pada saat mereka tutup; memetakan pola parkir kendaraan di lokasi penelitian; memetakan pola sirkulasi pejalan kaki dan pengendara kendaraan dengan metode *person centered mapping*.

Data-data hasil wawancara dan observasi dimasukkan ke dalam matriks tabulasi data menggunakan bantuan komputer. Analisis secara kuantitatif dilakukan dengan melihat persentase

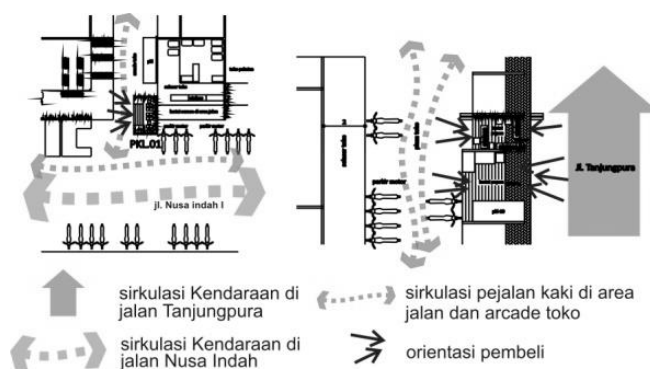
potret data penggunaan elemen-elemen teritori dari masing-masing *User Group*. Berikutnya, dilakukan analisa secara kualitatif dengan bantuan gambar-gambar pemetaan teritori yang berguna untuk melihat dan membahas kualitas ruang secara spasial. Pembahasan dengan menggunakan gambar-gambar pemetaan teritori secara kualitatif, berfungsi untuk membahas bagaimana kualitas ruang yang ada di lokasi penelitian dari masing-masing *User Group* serta bagaimana interaksi dan hubungan yang terjadi diantara kelompok tersebut.

HASIL

Irwin Altman (1975) membagi teritori menjadi tiga kategori dikaitkan dengan keterlibatan personal, *involvement*, kedekatan dengan kehidupan sehari-hari individu atau kelompok dan frekuensi penggunaan. Tiga kategori tersebut adalah *primary*, *secondary* dan *public territory*. Dari hasil analisis data lapangan, didapatkan hasil sebagai berikut :

Primary Territory User Group PKL. Untuk jenis pemilikan teritori, semuanya merupakan jenis teritori yang informal-permanen, karena teritori PKL terbentuk di area yang merupakan bukan peruntukannya, tanpa izin dan ditempati secara permanen sepanjang waktu. Batasan ruang pembentuk teritori PKL semua berbatasan dengan ruang jalan, menggunakan meja/ box PKL, penggunaan dinding, atap dan lantai semipermanen.

Teritori PKL disebabkan adanya motif dan kebutuhan dari pedagang kaki lima untuk berjualan di lokasi yang dianggap strategis di ruang publik dengan membangun ‘produk fisik’ berupa kios. Kios-kios terbentuk dengan dipengaruhi kebutuhan (unsur laten) PKL dalam *display* barang, menyimpan barang dagangan, perlindungan dari iklim dan dengan biaya yang murah atau bahkan tidak dengan menggunakan biaya.

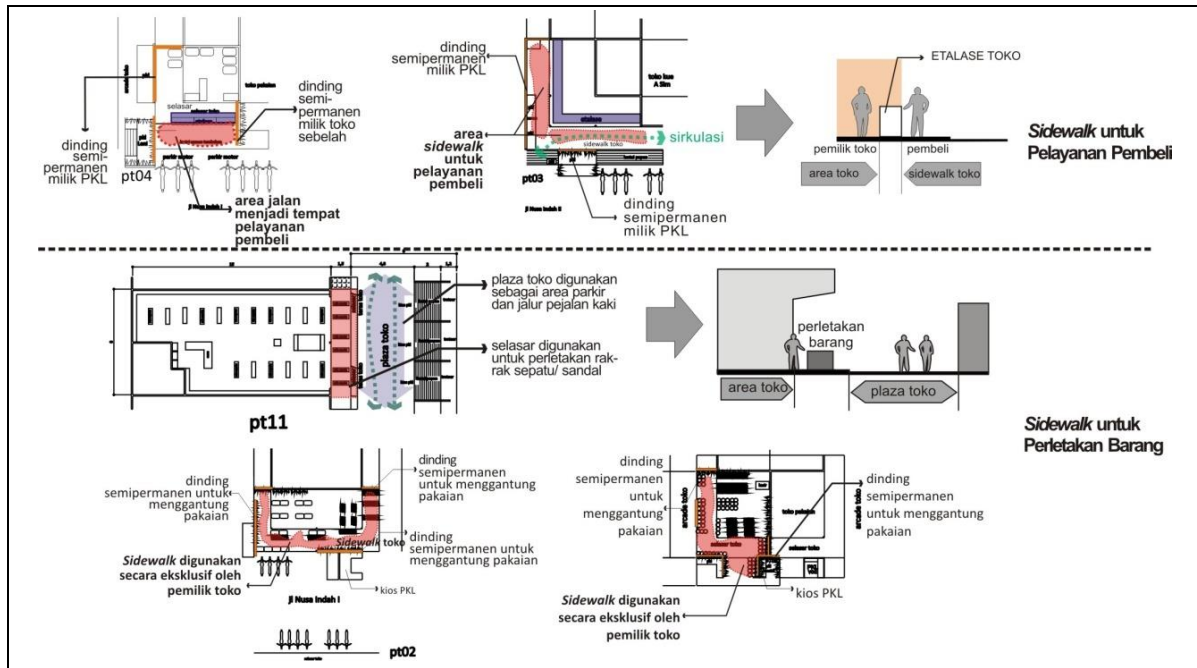


Gambar 2. Orientasi kios PKL ke arah sirkulasi pengunjung
Sumber : hasil analisa, 2008

Pada malam hari kios tidak dipindahkan dan tetap berada di tempatnya semula. Tidak ada aktivitas berjualan sehingga kios hanya digunakan sebagai tempat untuk menyimpan barang dagangan dengan dimasukkan ke dalam meja kios lalu dikunci untuk pengamanan. Ada juga kios yang menutup ruang kios dengan dinding-dinding semipermanen sebagai upaya untuk menyimpan barang dagangan di dalamnya. Faktor kenyamanan dan keamanan secara umum tidak dirasakan sebagai masalah. PKL cenderung menerima kondisi yang terbatas dan berusaha menyesuaikan diri terhadap ketidak-nyamanan tersebut.

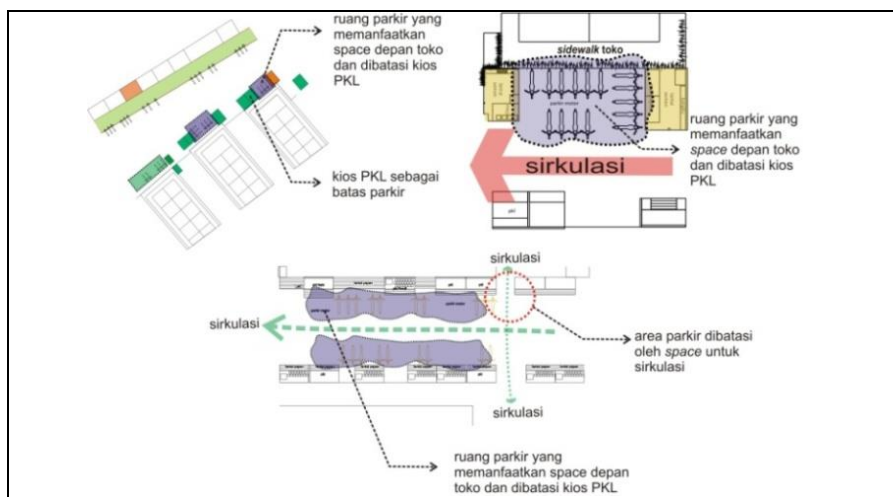
Primary Territory User Group Pemilik Toko. Semua jenis pemilikan teritori pemilik toko semuanya adalah formal-permanen, yaitu dimiliki secara legal dan sah serta dikuasai sepanjang waktu. Elemen pembentuk batasan teritori adalah berupa ruang toko tempat mereka meletakkan barang-barang dagangan. Beberapa jenis toko, seperti toko elektronik, toko mas dan toko kue menggunakan etalase sebagai media *display* barang dagangan kepada pembeli. Pemilik toko juga memanfaatkan area *sidewalk* toko sebagai area display. Penggunaan area *sidewalk* toko oleh pemilik toko dapat dibedakan menjadi dua, yang pertama adalah pemanfaatan secara langsung yaitu dengan memanfaatkan area *sidewalk* toko dengan langsung meletakkan atau menggantungkan barang dagangan di area itu. Yang kedua adalah pemanfaatan secara tidak langsung yaitu, memanfaatkan area *sidewalk* toko hanya sebatas sebagai tempat berdiri dan melayani calon pembeli seperti yang terjadi di toko-toko yang menggunakan etalase.

Sebagian besar pemilik toko merasa terganggu akibat keberadaan PKL di depan toko mereka karena menyebabkan pemandangan yang buruk, menghalangi toko serta kebisingan yang ditimbulkan dari aktivitas PKL *Video CD*. Upaya kontrol yang dilakukan untuk mengatasi ketidaknyamanan itu cenderung dilakukan secara pasif dengan personalisasi dan penandaan teritori karena pada dasarnya gangguan berasal dari luar *primary territory* mereka.



Gambar 3. Macam perletakan barang di teritori Pemilik toko
Sumber : hasil analisis, 2008

Primary Territory User Group Tukang Parkir. Sebagian besar jenis teritori tukang parkir adalah informal-permanen, sedangkan sebagian kecil yang lain adalah teritori parkir formal-permanen. Terdapat area informal-semipermanen yang terletak di atas ruang jalan yang sebenarnya bukan diperuntukkan sebagai area parkir, tetapi karena kurangnya ruang parkir penggunaan area tersebut ‘dilegalkan’.

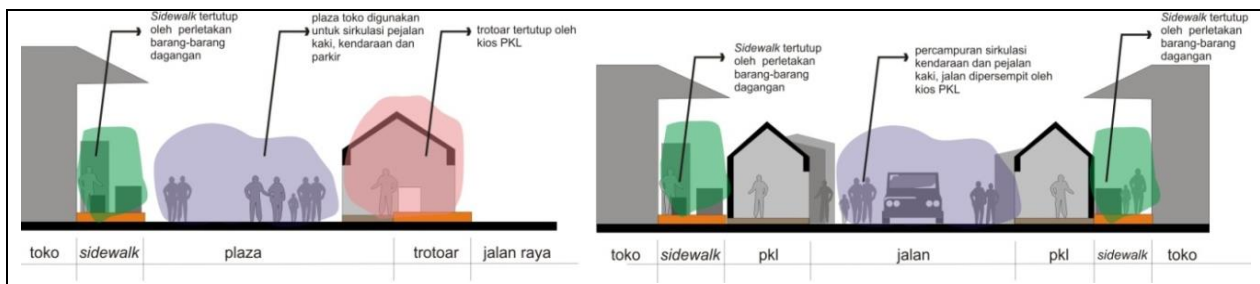


Gambar 4. Penggunaan ruang parkir di area ruang jalan
Sumber : Analisis, 2008

Elemen pembentuk batasan ruang parkir adalah batas *sidewalk* toko, meja/lapak PKL, dan ruang jalan. Ada sebagian kecil yang menggunakan rambu sebagai elemen pembatas ruang.

Tukang parkir memanfaatkan *space* yang ada di depan area toko, seperti badan jalan atau area plaza toko. Sudah ada kesepakatan bersama antar tukang parkir untuk batas masing-masing area parkir. Karena tidak ada batasan yang jelas antara area parkir dengan ruang jalan, menyebabkan tukang parkir cenderung akan memanfaatkan lebih banyak ruang jalan untuk area parkir pada saat ramai pengunjung.

Public Territory User Group Pengunjung. *User group* pengunjung dikelompokkan menjadi kelompok pejalan kaki dan pengendara kendaraan. Pejalan Kaki cenderung menggunakan area Jalan Nusa Indah atau Tanjungpura sebagai jalur sirkulasi, dibanding menggunakan jalur khusus pejalan kaki, seperti *sidewalk* toko, dan trotoar. Area *sidewalk* toko sebagian besar tertutup oleh perletakan barang dan dinding-dinding semipermanen Pemilik toko atau PKL, sehingga tidak dapat digunakan untuk sirkulasi. Jalan Nusa Indah II merupakan jalur sirkulasi kendaraan satu arah dari arah Jalan Tanjungpura, terdapat banyak bagian jalan yang rusak dan berlubang dan keberadaan kios PKL di area jalan membuat ruang jalan menjadi sempit sehingga menyebabkan ketidaknyamanan dalam berkendara.



Gambar 5. Kondisi sirkulasi pejalan kaki dan kendaraan di kawasan penelitian
Sumber : survei, 2008

Pejalan kaki dan pengendara kendaraan merasa terganggu dari sisi visual dan gerak/motorik akibat keberadaan kios-kios PKL yang memberikan pemandangan yang buruk dan menimbulkan kemacetan. Pejalan kaki cenderung merasa sirkulasi di dalam kawasan penelitian tidak nyaman, panas pada siang hari, terlalu padat dan takut tertabrak oleh kendaraan yang lewat.

Secondary Territory. Sebagian besar jenis pemilikan *secondary Territory* adalah informal- sementara. Hal tersebut sesuai dengan elemen pembentuk ruang yang terbentuk dari ruang jalan dan *sidewalk* toko yang sebenarnya merupakan *secondary* atau *public Territory user group* lain. Faktor kenyamanan dan keamanan cenderung tidak dirasakan sebagai gangguan. Tetapi sebagian besar kelompok pemilik toko merasa terganggu dari sisi kenyamanan visual dan kenyamanan motorik karena area depan toko mereka terhalangi oleh kios PKL dan tukang parkir.

PEMBAHASAN

Teritorialitas *User Group* PKL. Ciri dari teritorialitas adalah ber-ruang dan memiliki motif (Halim, 2005: 254). Teritori PKL muncul disebabkan adanya motif dan kebutuhan dari Pedagang Kaki Lima untuk berjualan di lokasi yang dianggap strategis di ruang publik dengan membangun ‘produk fisik’ berupa kios. Kios-kios terbentuk dengan dipengaruhi kebutuhan (unsur laten) PKL dalam *display*, menyimpan barang dagangan, perlindungan dari iklim dan dengan biaya yang murah atau bahkan tidak dengan menggunakan biaya. Modal yang kecil mendorong penggunaan material seadanya, agar pengeluaran dapat ditekan sekecil mungkin.

Menurut Altman, *primary territory* adalah suatu area yang dimiliki, digunakan secara eksklusif, disadari oleh orang lain, dikendalikan secara permanen, serta menjadi bagian utama dalam kegiatan sehari-hari penghuninya. Area tersebut memiliki kognisi kepemilikan yang tinggi dan kontrol yang lengkap dari pemilik sehingga pelanggaran dianggap sebagai masalah yang serius. Altman tidak menjelaskan bagaimana jika area yang dikendalikan secara permanen tersebut bukan merupakan area yang dimiliki secara formal, seperti halnya ruang publik yang ditempati oleh PKL. Dari hasil pengamatan di lapangan menunjukkan, PKL melakukan invasi di area publik yang menyebabkan terbentuknya *Primary Territory* Pedagang kaki lima. PKL merasa menguasai dan dapat mengendalikan area tersebut, meskipun teritori tersebut terbentuk di area yang publik dan tidak dimiliki secara formal. Keberadaan teritori primer PKL tersebut mengubah unsur manifes dari fungsi sesungguhnya area itu sebagai area publik menjadi area privat. **Teritorialitas *User Group* Pemilik Toko.** Pemilik Toko memiliki teritori formal, karena dimiliki secara legal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ada dua macam teritori yang terbentuk dari *User Group* Pemilik toko. Yang pertama adalah teritori yang terbentuk akibat motif dan kebutuhan pemilik toko (unsur laten) agar *display* barang dagangan dapat dengan mudah dilihat oleh pembeli dan menambah luas area *display*. Pemilik Toko melakukan penandaan dengan meletakkan barang dagangan di area itu. Hal tersebut menunjukkan upaya personalisasi secara ekstensif dan upaya kontrol di teritori primer (Altman, 1975). Dengan terbentuknya batasan-batasan fisik di *sidewalk* toko, membentuk teritorialitas yang non-formal dari pemilik toko di area yang manifestasinya sesungguhnya adalah domain publik. Teritorialitas yang kedua terbentuk karena Pemilik toko juga memiliki motif atau kebutuhan untuk membatasi area tokonya dengan toko tetangga atau kios PKL. Hal tersebut menunjukkan adanya keinginan untuk mempertegas batas-batas teritori untuk menghindari invasi. Agresi lebih umum terjadi pada kondisi teritori yang belum terbentuk secara nyata (Halim, 2005). Dengan demikian, ada unsur laten diluar manifes area itu sebagai jalur pejalan kaki sebagai suatu ‘teritori non-formal’

yang dirasakan dimiliki oleh Pemilik toko di area yang berbatasan dengan wilayah toko lain atau PKL sebagai upaya pertahanan atau agresi. Untuk memperkuat teritorialitas tersebut, Pemilik toko membuat batasan-batasan fisik berupa dinding-dinding pembatas atau barang yang sengaja diletakkan dibatas area toko.

Teritorialitas *User Group* Tukang Parkir. Area yang diperuntukkan sebagai ruang parkir, tidak mencukupi semua kebutuhan parkir. Kebutuhan adanya ruang parkir membuat tukang parkir memanfaatkan *space* lain, seperti ruang jalan, sebagai ruang parkir (*on-street*). Penggunaan *space* tertentu sebagai area parkir yang berlangsung dalam waktu yang lama, membentuk suatu area atau ruang yang seolah-olah dikuasai oleh tukang parkir, meskipun sebenarnya area atau ruang itu adalah fasilitas publik. Penggunaan dan pengendalian ruang secara permanen, menunjukkan ciri *primary territory* yang dikemukakan oleh Altman. *Primary Territory* tukang parkir terbentuk akibat invasi terhadap ruang publik yang dilakukan tukang parkir dengan penggunaan ruang secara terus-menerus dan menjadi kebiasaan, sehingga kelompok tukang parkir itu merasa menguasai dan dapat melakukan kontrol terhadap area tersebut, meskipun manifestasi ruang itu adalah ruang publik.

Teritorialitas *User Group* Pejalan Kaki. Pejalan kaki memiliki teritori formal berupa area *sidewalk* toko dan trotoar untuk jalur sirkulasi yang merupakan zona publik. Selain untuk sirkulasi, teritori tersebut juga berfungsi untuk memfasilitasi aktivitas *window-shopping* dan membeli. Sebagian besar *sidewalk* dan trotoar yang memiliki unsur manifes sebagai jalur sirkulasi pejalan kaki, tidak dapat digunakan untuk sirkulasi karena privatisasi yang dilakukan oleh *User Group* lain. Hal tersebut menyebabkan keterhubungan antarjalur sirkulasi itu menjadi terpotong-potong dan tidak menerus. Menurut Altman (1975), teritori publik memiliki kognisi kepemilikan yang rendah dan personalisasi serta kontrol yang lemah. Karena berada di zona publik, menyebabkan peluang invasi dari pengguna lain menjadi lebih besar dan pejalan kaki tidak memiliki kontrol yang kuat untuk mempertahankan teritori formalnya yaitu jalur pejalan kaki.

Teritorialitas *User Group* Pengendara Kendaraan. Penggunaan area jalan oleh pejalan kaki menyebabkan terjadinya tumpang tindih penggunaan teritori oleh kelompok pejalan kaki dengan pengendara kendaraan di dalam suatu area yang sama. Percampuran antara sirkulasi pejalan kaki dan pengendara kendaraan di Jalan Nusa Indah menimbulkan rasa tidak nyaman dan tidak aman bagi kedua kelompok pengunjung itu.

Secondary Territoriality. Bagi Pemilik toko, PKL dan Tukang Parkir, teritori sekunder mereka adalah area ruang jalan yang berbatasan dengan teritori primer mereka. Menurut Altman

(1975), teritori sekunder memiliki tingkat kognisi kepemilikan yang sedang dan personalisasi dilakukan pada periode yang legal. Hal tersebut sejalan dengan hasil pengamatan, dimana kontrol dilakukan lebih kepada penjagaan norma-norma dan keamanan. *Secondary territory* berfungsi untuk mendukung aktivitas di *primary territory* tersebut atau aktivitas yang laten atau simbolik seperti adanya kebutuhan Pemilik toko dan PKL terhadap ruang jalan di depan tokonya untuk jalur sirkulasi barang dan pengunjung. Seperti halnya juga Tukang parkir yang dapat memanfaatkan ruang jalan untuk sirkulasi pengunjung bahkan untuk perluasan area parkir mereka.

Dari hasil pembahasan di atas, berikut enam konsep teritorialitas dari masing-masing kelompok pengguna, yaitu: pertama, Teritorialitas PKL adalah mekanisme penguasaan ruang dengan invasi ruang publik, karena terbentuknya 'produk fisik' yang berfungsi untuk memenuhi motif tertentu (unsur laten), sehingga membentuk teritori Non-Formal yang dapat dikendalikan secara eksklusif oleh PKL.



Gambar 6. Pembentukan teritorialitas PKL

Sumber : hasil analisis, 2008

Kedua, Teritorialitas Pemilik Toko terdiri dua mekanisme, yang pertama adalah mekanisme penguasaan ruang yang muncul akibat terbentuknya 'Produk Fisik' yang berfungsi untuk memenuhi motif tertentu (unsur laten), sehingga membentuk teritori Non-Formal yang dapat dikendalikan secara eksklusif. Yang kedua adalah, teritorialitas menjadi mekanisme mempertahankan (agresi) area yang dirasakan dikuasai oleh Pemilik toko (unsur laten), dengan menggunakan dan membentuk 'Produk Fisik' untuk memperjelas dan memperkuat batas-batas area kekuasaan dengan mengubah unsur manifes dari fungsi ruang tersebut.



Gambar 7. Pembentukan teritorialitas Pemilik Toko

Sumber : hasil analisis, 2008

Ketiga, Teritorialitas Tukang Parkir adalah mekanisme Tukang parkir untuk menambah luas area parkir melalui invasi ruang publik dengan membentuk ‘produk fisik’ tertentu (unsur laten), sehingga terbentuk teritori yang bersifat Non-formal yang dapat dikendalikan dengan mengubah unsur manifes dari fungsi ruang jalan.



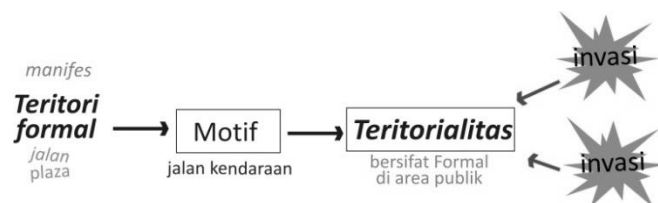
Gambar 8. Pembentukan teritorialitas tukang parkir
Sumber : hasil analisis, 2008

Keempat, Teritorialitas Pejalan kaki merupakan mekanisme dalam memenuhi aktivitas berjalan, melihat dan berbelanja yang terganggu akibat invasi yang dilakukan oleh *user group* lain di teritori formalnya dengan menggunakan *space* lain, sehingga menyebabkan terbentuknya teritori Non-formal untuk bersirkulasi.



Gambar 9. Pembentukan teritorialitas pejalan kaki
Sumber : hasil analisis, 2008

Kelima, Teritorialitas Pengendara kendaraan adalah mekanisme pengendara kendaraan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan di teritori formalnya yang manifestasinya sebagai jalur sirkulasi kendaraan terganggu akibat aktivitas *user group* lain.



Gambar 10. Pembentukan teritorialitas pengendara kendaraan
Sumber : hasil analisis, 2008

Keenam, *Secondary Territoriality* terbentuk akibat adanya hubungan yang kuat dari sisi kedekatan jarak maupun fungsi yang mendukung aktivitas di *Primary Territory* Pemilik toko, PKL dan Tukang parkir.



Gambar 11. Pembentukan secondary territoriality
Sumber : hasil analisis, 2008

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di dalam penelitian ini yang mengacu pada pertanyaan penelitian maka dapat disimpulkan Konsep Perilaku Teritorialitas, yaitu: pertama, **Teritorialitas User Group Invator**, yaitu teritorialitas dari *User Group* tertentu (Pedagang kaki lima, Pemilik toko dan Tukang parkir) yang menyebabkan terganggu atau berubahnya teritorialitas kelompok lain. Penyebabnya adalah terbentuknya teritori non-formal yang baru (PKL) atau perluasan dari teritori formal yang sudah ada sebelumnya (Pemilik toko dan Tukang parkir). Teritori non-formal PKL ditunjukkan dengan produk fisik berupa kios yang didirikan di ruang publik. Perluasan teritori Pemilik toko akibat penggunaan *sidewalk* sebagai area *display* barang, sedangkan Tukang parkir memperluas area parkirnya saat kebutuhan ruang parkir meningkat.

Kedua, **Teritorialitas User Group Agresor**, yaitu teritorialitas dari *User Group* tertentu (Pemilik Toko) sebagai respons untuk upaya mempertahankan atau memperjelas batas area kekuasaannya dari pihak lain yang dirasakan sebagai ancaman. Ketika ancaman dari pihak lain dirasakan semakin besar, akibatnya mereka berusaha memperkuat dan memperjelas teritorialitasnya itu dengan menggunakan batas-batas fisik. Produk fisik tersebut seperti perletakan barang, dinding semi-permanen (juga dimanfaatkan untuk gantung barang dagangan) yang membatasi terhadap teritori tetangga, sampai dengan peninggian area *sidewalk*.

Ketiga, **Teritorialitas User Group Penderita**, yaitu teritorialitas dari *User Group* tertentu (Pejalan kaki dan Pengendara kendaraan) yang terpengaruh oleh teritorialitas *User Group* invator dan agresor, sehingga terjadi perubahan-perubahan yang membuat *User Group* tersebut menjadi terganggu. Karena teritori mereka itu merupakan teritori publik, menyebabkan tidak ada upaya pertahanan yang berarti seperti dengan agresi dan penandaan fisik tetapi mereka hanya berusaha menyesuaikan diri terhadap keadaan di lapangan dengan memanfaatkan ruang yang ada untuk bersirkulasi.

Saran

Dari simpulan penelitian, diketahui bahwa teritorialitas kelompok Invator memberikan pengaruh yang besar dan berantai terhadap pembentukan teritorialitas kelompok Agresor dan Penderita. Untuk menghilangkan atau meminimalisir pengaruh tersebut dapat dilakukan upaya privatisasi ruang publik untuk teritori kelompok Invator disertai penzoningan yang jelas dan penegasan batas-batas teritori publik. Dengan demikian akan terbentuk teritori formal dari kelompok Invator yang akan memudahkan didalam upaya kontrol, baik dari Publik maupun Pemerintah Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Altman, Irwin. 1975. *The Environment And Social Behavior*. California: Brooks/Cole Publishing Company.
- Anggoro, M. Toha. 2008. *Metode Penelitian*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Angkasa, Zuber. 1998. *Teritorialitas Pada Kawasan Permukiman Rakit Di Muara Sungai Ogan Palembang*. Yogyakarta: MPKD UGM.
- Bugin, Burhan. 2006. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Department of Architecture and Civil Design of The Greater London Council. 1978. *An Introduction To Housing Layout*. London: The Architectural Press.
- Halim, Dedi. 2005. *Psikologi Arsitektur Pengantar Kajian Lintas Disiplin*. Jakarta: Grasindo.
- Haryadi dan Setiawan, B. 1995. *Arsitektur Lingkungan dan Perilaku, Suatu Pengantar ke Teori, Metodologi dan Aplikasi*. Jakarta: Pusat Studi Lingkungan Direktorat Jendral Pendidikan dan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Hidayah, Retna. 1998. *Pesantren Pebelan, Kajian Terhadap Deliniasi Teritori Pesantren*. Tesis tidak dipublikasikan. Yogyakarta: Teknik Arsitektur, UGM.
- I.G.A.K. Wardani, dkk. 2006. *Teknik Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Moleong, Lexy. 1997. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Reksakarya.
- Pemerintah Kota Pontianak. 2008. *Peraturan Walikota Pontianak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 dan Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum*. Pontianak: Pemerintah Daerah Kota Pontianak.
- Pemerintah Kota Pontianak. *Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak 2002-2012*. Pontianak: Pemerintah Daerah Kota Pontianak.
- Program Pasca Sarjana UGM. 2003. *Petunjuk Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*. Yogyakarta: Sekolah Pasca Sarjana UGM.
- Rusmana, Yunanta Arief. 2007. *Teritorialitas Pada Jalur Pedestrian di Penggal Jalan Urip Sumoharjo Yogyakarta, Kualitas Hubungan Perilaku Pengguna Teritori dengan Setting Jalur Pejalan Kaki*. Yogyakarta: Teknik Arsitektur UGM.
- Wijaya, Willie. 2006. *Kamus Lengkap 500 Milyar*. Semarang: CV. Widya Karya.